

**LEGISLATOR DAN KONSTITUEN (STUDI TERHADAP PERAN ALIMUDDIN
BUDUNG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
MASSEWAE KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG)**



*Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelara Sarjanah Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pada
Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

WAHYUDDIN

NIM: 30600112028

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDDIN
NIM : 30600112028
Tempat/Tgl. Lahir : Kaliang, 14 April 1994
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Alamat : Jln Borong Raya Perumahan Graha Janna Blok C 11
Judul : LEGISLATOR DAN KONSTITUEN (STUDI
TERHADAP PERAN ALIMUDDIN BUDUNG
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DESA MASSEWAE KEC. DUAMPANUA KAB.
PINRANG)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2016
Yang menyatakan,

WAHYUDDIN
NIM. 30600112028

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada diri penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“LEGISLATOR DAN KONSTITUEN (Studi Terhadap Peran Alimuddin Budung Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”**.

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para kerabat nya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik fakultas Ushuluddin, filsafat dan politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini, penulis mendasar pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis tentang legislator dan konstituen.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, H. Bunyamin dan Hj. Murniti Djalahu yang tiada pernah putus mendoakan demi kesuksesan belajar putranya dan telah

memberikan seluruh cinta serta kasih sayangnya, dan juga yang telah memberikan dukungan lahir batin kepada penulis dalam proses studi selama ini.

2. Keluarga dan kerabat dekat yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta selalu memberikan dukungan dalam menempuh studi kurang lebih 4 tahun.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, filsafat dan politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Syahrir Karim, S.Ag, M.Si. Ph.D selaku sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
6. Ibu Ismah Tita Ruslin, S.IP, Msi dan ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP, MA selaku pembimbing yang telah memberikan banyak pengetahuan dan kontribusi ilmu terkait judul yang diangkat penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si dan Dr. H. M. Abduh W, M.TH.I selaku penguji yang memberikan banyak masukan dalam perbaikan skripsi yang disusun oleh penulis.
8. Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Makassar yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi.

9. Teman-teman kerabat mahasiswa serta para sahabat yang telah membantu dan teman-teman Ilmu politik Angkatan 2012, teman – teman organisasi PMII Makassar, KPMP, terima kasih karena telah memberikan arti kebersamaan dan membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.

AamiinyaaRabbalAlamiin.

Makassar, 2016

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
WAHYUDDIN
NIM. 30600112028

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tinjauan teoritis	12
F. Metodologi Penelitian	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Kab. Pinrang	26
B. Gambaran Umum Kec. Duampanua	27
C. Gambaran Umum Desa Massewae	28
D. Profil Alimuddin Budung	38
BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN	41
A. Peran Alimuddin Budung sebagai legislator dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Massewae	41

B. Relasi Antara Alimuddin Budung Dengan Masyarakat	
di Desa Massewae	50
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran/implikasi	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



ABSTRAK

Nama : Wahyuddin

Nim : 30600112028

**Judul : Legislator dan Konstituen (Studi Terhadap Peran Alimuddin Budung
Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Massewae Kec. Duampanua
Kab. Pinrang)**

Penelitian ini membahas tentang hubungan legislator dengan konstituennya dengan titik fokus pembahasan pada peran Alimuddin Budung khususnya dibidang pembangunan infrastruktur di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Hadirnya sosok Alimuddin Budung sebagai anggota legislatif merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran Alimuddin Budung sebagai legislator dalam pembangunan infrastruktur di Desa Massewae dan bagaimana relasi Alimuddin Budung dengan masyarakat di Desa Massewae. Teori yang digunakan yaitu teori perwakilan, teori komunikasi, teori peran, dan teori kekuasaan.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan Metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan peran Alimuddin Budung dalam pembangunan infrastruktur sudah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti perbaikan jalan dan jembatan pertanian. Adapun relasi yang dibangun membantunya terpilih dalam dua periode masa jabatan di DPRD. selama menjabat sebagai anggota legislatif selalu jalan sebagai orang yang senang berinteraksi, berdiskusi kepada masyarakat dengan menggunakan pola komunikasi formal, pendekatan keagamaan dan sosialisasi politik.

Diharapkan kedepannya legislator lebih meningkatkan perannya dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada, sering berkunjung, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat tanpa ada perbedaan antara pendukung maupun yang tidak mendukung terutama di daerah konstituennya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada awalnya badan legislatif hanyalah sekelompok orang yang diberikan tugas oleh raja untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan pemerintahan dan peperangan. Akan tetapi lambat laun dalam setiap penyerahan dana (semacam pajak) disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak *privilege* sebagai imbalan dengan demikian secara berangsur-angsur sekelompok orang tersebut berubah namanya menjadi badan legislatif (parlemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi hak-hak raja secara absolut. Dalam perkembangannya badan legislatif ini dilakukan pemilihan melalui mekanisme pemilihan umum sehingga dapat diterima keberadaannya secara sah dan menyeluruh diseluruh dunia sebagai badan yang mewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam membuat undang-undang.¹

Di Indonesia lembaga Negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan adalah dewan perwakilan rakyat. Lembaga ini sebagai salah satu wujud dari realisasi demokrasi di Indonesia, dimana sistem yang dilakukan sebuah Negara demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai posisi terpenting sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena dewan perwakilan rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga difungsikan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat .

¹ A.Rahman,*Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007), h 124

Kesepakatan yang diberikan oleh rakyat sebenarnya adalah unsur esensial yang harus selalu menjadi dasar keputusan yang dibuat oleh para wakil rakyat, mereka harus berpegang kepada mandat yang diberikan oleh rakyat. Para wakil rakyat itu adalah orang-orang pilihan yang harus bersikap amanah dalam arti benar-benar menjalankan komitmen yang telah dibuat bersama rakyat yang diwakili. Mereka tidak boleh menyelewengkan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Harus tetap bertindak untuk dan atas nama rakyat yang diwakili.

Akan tetapi, sebagaimana yang terjadi, antara rakyat yang diwakili dengan para wakil yang terdiri dari sebagian kecil dari rakyat tersebut selalu tercipta jarak. Bahkan ada dinding pembatas yang memisahkan antara wakil dengan yang diwakili. Aktivitas yang dilakukan oleh para wakil dalam posisi keterwakilannya, sering kali justru kebalikan dari kehendak rakyat yang diwakilinya. Sebagian terbesar penyebabnya adalah mereka melakukan aktivitas atas dasar kehendak organisasi politik yang mendudukkannya sebagai wakil. Jadi untuk kepentingan organisasi politik atau partai politik, bukan untuk rakyat yang diwakilinya.²

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang.

² Samsul Wahidin, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h 18-19

Diluar dari pada itu badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu.³

Sebagai anggota legislatif, amanah yang dititipkan oleh masyarakat menjadi tugas penting, termasuk aspirasi masyarakat yang harus mereka perjuangkan. Sebagai lembaga politik yang menjadi tumpuan akhir masyarakat atas kebijakan yang akan diberikan bagi mereka sudah selayaknya bagi wakil rakyat untuk mendengar aspirasi dari bawah. Setumpuk harapan masyarakat telah mereka dengar dan menjanjikan untuk mereka perjuangan dilembaga terhormat saat mereka kampanye. Janji-janji ini diharapkan tidak sekedar janji dan berakhir tanpa ada tindak lanjut.⁴ Dalam surah an-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya:

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa sudah semestinya apabila seseorang telah diberi amanah maka semestinya harus menjaga amanah yang telah diberikan bukan

³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008),h 316

⁴ Herman Syamsuddin, *Masih Ada Keberpihakan*, (Makassar : Komite Pemantau Legislatif 2011),h 3

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra. 2015),h 88

sebaliknya malah berkhianat dan menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Fungsi utama legislatif yang paling penting ialah: 1) menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberikan hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama dibidang anggaran. 2) mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberikan tugas khusus.⁶

Ketika masa kampanye dalam rangka pemilihan umum berlangsung, setiap calon anggota legislatif berlomba-lomba menarik simpati rakyat. Agar rakyat mau memilih mereka, para calon anggota dewan pun menebar pesona diri, baik berupa kemurahan hati dengan memberikan suatu bantuan langsung kepada yang membutuhkan, maupun bantuan tak langsung kepada seluruh masyarakat. Bantuan tak langsung ini disampaikan melalui janji-janji yang akan direalisasikan bila mereka terpilih dan duduk menjadi anggota dewan. Biasanya isi janji yang dibagikan oleh masyarakat pemilih adalah seputar pembangunan, yaitu berupa perbaikan jalan, dan segala bentuk pembangunan yang untuk merealisasikannya membutuhkan proses yang panjang dan dana yang besar.⁷ Dalam surah al-Isra ayat 34

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008),h 223-233

⁷ Herman Syamsuddin, *Masih Ada Keberpihakan*, (Makassar : Komite Pemantau Legislatif 2011),h 107

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^٨ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^٩ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.⁸

Maksud ayat diatas setiap komitmen atau ucapan yang telah kita janjikan maka kita harus pertanggung jawabkannya. Ada pepatah kuno mengatakan mulutmu harimau mu ungkapan ini menandakan bahwa kita harus berhati-hati dengan semua yang akan diucapkan atau dijanjikan kepada orang lain karna masih banyak diantara kita yang menilai kesungguhan ataupun kepribadian seseorang dari apa yang telah diucapkan khususnya dari apa yang kita janjikan. Dan sungguh kita harus berhati-hati terhadap semua janji yang sudah diucapkan. Besar kecilnya, penting tidaknya bahkan fatal atau tidaknya janji tersebut harus dipenuhi , toh kenapa harus berjanji apa bila tidak sanggup untuk menepatinya.

Setiap masa kampanye pemilu atau pilkada, para calon wakil rakyat terbiasa menebar janji-janji disana-sini. Kebanyakan janji-janji muluk semisal memberantas korupsi, kolusi, dan menggariskan pendidikan. Apa yang disebut kampanye simpatik, dengan member santunan, kerja bakti untuk kebersihan, member fasilitas atau pelayanan tertentu oleh calon legislatif atau calon pejabat publik itu, menjadi

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra. 2015),h 286

sesuatu yang agak mengherankan, karena pada hari-hari biasa hal semacam itu tidak pernah dilakukan.

Perspektif islam, dimana suatu kepemimpinan baik sebagai wakil rakyat dalam lembaga legislatif ataupun suatu pejabat dalam lembaga eksekutif adalah amanah, bukan hak istimewa apalagi hadiah. Kepemimpinan bukanlah untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan demi kepentingan ummat oleh karena itu, hanya bila wakil rakyat mempunyai kesadaran transidental semacam ini, mereka akan bersedia dan berjuang untuk melunasi janji-janji mereka, apapun hambatan yang akan mereka hadapi kelak. Sebab mereka yakin bahwa setiap janji itu harus dipertanggung jawabkan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Didalam ajaran islam kita tidak boleh meminta kepemimpinan atau jabatan. Juga kita tidak boleh memberikannya kepada orang yang memintanya. Jika ada seseorang yang menggebu-gebu dalam mengejar suatu jabatan, motif orang yang bersangkutan tersebut harus kita curigai, boleh jadi dia punya agenda tersendiri untuk kepentingan pribadi dibalik janjinya untuk memperbaiki nasib rakyat.⁹

Semudah memberi janji, semudah itu pula melupakannya. Seperti itulah yang banyak dilakukan dilakukan oleh sebagian anggota dewan saat ini. Ketika sudah terpilih dan duduk dilembaga legislatif, tak ada lagi janji yang diingat. Mereka meninggalkan masyarakat yang telah memilihnya. Politik memeng didesain sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusioanal maupun

⁹ Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013), h 47-48

inkonstitusional. Dalam teori klasik Aristoteles politik memang didudukkan sebagai upaya yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, meski kemudian banyak mengalami pergeseran. Politik sekarang ini banyak disalah artikan dengan menjadikannya sebagai upaya strategi yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, meski itu dengan segala upaya dan cara. Semua itu sangat dipengaruhi oleh perilaku politik.¹⁰

Bila sejak awal orang berjanji demi kepentingan pribadi maka janji-janji yang disampaikan selama kampanye pemilu adalah sekedar permainan kata-kata atau pengelolaan, kesan untuk menarik simpatik orang banyak, tanpa benar-benar dilandasi dengan niat yang tulus untuk mewujudkan janji-janji tersebut.¹¹

Sebagai wakil rakyat, DPRD saat ini menuai banyak sorotan. Mulai dari persoalan kinerjanya sebagai wakil rakyat, pelaksanaan fungsi yang tidak maksimal, pelanggaran etik, sampai kepada pelanggaran pidana, tak terkecuali korupsi.

Stigma yang terbangun dimasyarakat tentang DPRD begitu sangat memperhatikan mulai dari malas ikut rapat tapi rajin studi banding, hambur-hamburkan uang rakyat, mengabaikan aspirasi warga, korupsi berjamaah dan lain-lain. Ketidak berpihakan ini kontradiktif dengan masih banyaknya persoalan gizi buruk, kelaparan dan lain sebagainya yang masih melilit warga di daerah-daerah lain. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik masih dibawah rata-

¹⁰ Herman Syamsuddin, *Masih Ada Keberpihakan*, (Makassar : Komite Pemantau Legislatif 2011),h 107-108

¹¹ Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013), h 49

rata sementara DPRD sebagai pilar utama demokrasi yang seharusnya menjadi aktor utama dalam mendorong inisiasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan lebih baik justru ikut larut dalam perilaku korup. Kinerja DPRD yang sangat rendah membuat kepercayaan publik semakin merosot.

Setumpuk masalah yang melilit anggota DPRD telah membawa lembaga ini kurang mendapat kepercayaan dimata masyarakat. Namun demikian patut menjadi pertanyaan, apakah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari anggota DPRD? Bagaimana pun juga, lembaga tempat mereka diberikan amanah oleh rakyat ini adalah salah satunya lembaga perwakilan yang diberikan oleh konstitusi Negara untuk menjamin hak-hak masyarakat agar dapat diakomodir aspirasinya. Kasus-kasus tersebut diatas bukan berarti seluruh anggota wakil rakyat yang menyandang sabut terhormat tersebut tidak punya karya sama sekali, atau bahkan semua menjadi buruk. Sejelek apapun DPRD dan anggotanya yang merupakan kader-kader terbaik partai politik, mereka ini adalah pilihan rakyat..¹²

Penelitian ini tentang relasi antara legislator dan konstituen, dengan berfokus pada kinerja salah satu sosok anggota DPRD Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu bapak Alimuddin Budung khususnya dibidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Massewae. Hadirnya sosok Alimuddin Budung sebagai anggota legislatif merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk mewakilinya didalam bidang pemerintahan. Ia merupakan kader terbaik

¹² Herman Syamsuddin, *Masih Ada Keberpihakan*, (Makassar : Komite Pemantau Legislatif 2011),h 143- 144

dari partai kebangkitan bangsa yang notabennya partai berasaskan islam, dan melalui peroses panjang demokrasi yang diselenggarakan pada tahun 2009 menjadikannya sebagai wakil rakyat untuk pertamakalinya, dan ditahun 2014 kembali terpilih untuk menjadi anggota legislatif yang kedua kalinya. Ini menandakan bahwa rakyat masih mempercayainya dengan memberikan amanah tersebut.

Tetapi kepercayaan dan amanah tidak diberikan begitu saja besar harapan yang ditipkan oleh rakyat dengan tujuan memberikan hasil kinerja yang betul-betul diperuntukkan oleh rakyat bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan. Karna itu sepantasnyalah segala harapan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan berada dipundak anggota DPRD.

Desa Massewae merupakan Desa dimana bapak Alimuddin Budung tinggal dan Desa dimana ia memperoleh banyak basis suara yang membuatnya terpilih menjadi salah satu anggota legislatif Kab Pinrang. Masyarakat tentu banyak menaruh harapan pada legislator yang telah dipilihnya untuk mewakili kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat. Berdasarkan alasan itulah yang menjadi dasar dan keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: Legislator dan Konstituen (Studi Terhadap Peran Alimuddin Budung Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Pinrang).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Alimuddin Budung sebagai legislator dalam pembangunan infrastruktur di Desa Massewae ?
2. Bagaimana relasi antara Alimuddin Budung dengan masyarakat di Desa Massewae ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Alimuddin Budung sebagai legislator dalam pembangunan infrastruktur di Desa Massewae.
- b. Untuk mengetahui relasi antara Alimuddin Budung dengan masyarakat Desa Massewae.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan seperti kalangan akademisi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik tentang legislator dan konstituen, peran legislator dalam pembangunan infrastruktur.

b. Secara Peraktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi, sebagai acuan bagi yang membutuhkan, dan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Serta sebagai salah satu syarat penulis untuk mendapat gelar sarjana satu.

D. Kajian Pustaka

sebagai salah satu syarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana satu.

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, dengan maksud menghindari duplikasi. Adapun penelitian tersebut yaitu:

Tabel I
beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam kajian pustaka

Nama	Judul	Masalah	Metode	Hasil
Josmagel Harapan	Hubungan Antara Anggota Legislatif dengan Konstituen di Daerah Pemilihnya	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas legislator masih belum dapat dihilangkan	kualitatif	Hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya masih belum terjalin secara harmonis. ¹³
Agus Sumardansyah	Peran Anggota Legislatif Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen	Berkecenderungan masalah waktu diadakannya komunikasi politik, partisipasi, dan dana yang terbatas	kualitatif	Dalam pelaksanaannya legislator banyak mendapat masukan-masukan dari masyarakat. ¹⁴
Noor Husnawati	Strategi Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Kurangnya komunikasi yang dibangun baik berupa komunikasi antar	kualitatif	Strategi ini tentunya tidak berlaku secara perorangan melainkan secara tim. dari beberapa strategi yang

¹³ Josmagel Harapan Sianturi, "Hubungan Antara Anggota Legislatif Dengan konstituen di Daerah Pemilihnya", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatra Utara Medan 2014

¹⁴ Agus Sumardansyah, "Peran Anggota Legislatif Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 1/No.01/2013, h 133

	Daerah, Dapil 1 Kec. Somba Opu Terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihnya	pribadi maupun komunikasi antar kelompok		dihasilkan yang mendapat respon, apabila secara langsung menemui konstituennya. ¹⁵
Elfa Sahrani	Peran Anggota Legislatif Kota Medan Dalam Pengawasan APBD	Kemiskinan, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.	kualitatif	DPRD melakukan kunjungan lapangan yang bertujuan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. ¹⁶
Budi Setiawan	Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Peningkatan Kinerja Anggota DPRD	Rendahnya produk regulasi yang dihasilkan oleh legislatif	kualitatif	Persoalan yang lazim terjadi adalah pemahaman dan kecendrungan sulitnya membina hubungan antara legislator dengan rakyat sebagai konstituen. ¹⁷
Wahyuddin	Legislator dan Konstituen (Studi Terhadap Peran Alimuddin Budung Dalam Pembangunan Infrastruktur	Bagaimana peran legislator dalam pembangunan infrastruktur	kualitatif	Peran legislator dalam pembangunan infrastruktur sudah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti perbaikan jalan dan jembatan pertanian.

Tabel diatas menggambarkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

E. Tinjauan Teoritis

1. Teori Perwakilan Politik

Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan bersifat politik. Sekalipun

¹⁵ Noor Hasnawati, "Strategi Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dapil 1 Kec. Somba Opu Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihnya", *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2011.

¹⁶ Elva Sahrani, "Peran Anggota Legislatif Dalam Pengawasan APBD", *Jurnal Citizenship* Volume 1 No 1 (2013), h 53

¹⁷ Budi Setiawan "Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD", *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 15 No 2 (2013), h 77

asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa kalangan yang merasah bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada pada masyarakat.¹⁸

Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu membuat undang-undang, dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya kedalam undang-undang

Menurut Miriam Budiardjo. Menurut teori yang berlaku (konsep perwakilan politik). Maka rakyatlah yang berdaulat, berkuasa dan mempunyai suatu kemauan yang oleh Rousseau disebut keinginan umum. Selanjutnya ia juga berpendapat, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk undang-undang. Sehingga dapat dikatakan lembaga perwakilan merupakan badan yang membuat keputusan yang meyangkut kepentingan umum.

Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan ini. Lembaga Negara ini

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia pustaka utama, 2008), h 317

merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.¹⁹

2. Teori Komunikasi Politik

Dalam konteks keilmuan, istilah komunikasi sudah mengalami perluasan. Komunikasi sudah milik semua disiplin ilmu, tidak hanya ilmu sosial, tetapi ilmu-ilmu eksakta pun sudah lekat dengan istilah komunikasi.²⁰

Komunikasi politik bersifat dimensional karena berkaitan dengan berbagai macam problem dan permasalahan. Tidak hanya berkisar tentang pembahasan proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Bahas sistem berksitsn pula dengan transformasi nilai-nilai yang dilaksanakan melalui kegiatan sosial dan pendidikan politik. Dalam praktek kenegaraan, keabsahan suatu sistem apabila mendapat dukungan dari seluruh warga Negara yang berada dalam lingkungan sisitem tersebut, yang terwujud dalam partisipasi politik sehingga sistem tersebut benar-benar mencerminkan totalitas aspirasi dan cita-cita seluruh warga masyarakat.

Menurut Santoso Santropoetro, esensinya adalah kesamaan pengertian diantara mereka yang berkomunikasi. Dalam kegiatannya, suatu komunikasi

¹⁹ Toni Andrianus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung Penerbit Nuansa, 2006), h 102

²⁰ Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h 5

berlangsung melalui suatu proses, jalan dan urutan kegiatan sehingga terjadi/timbul pengertian tentang suatu hal diantara unsure-unsur yang saling berkomunikasi. Komunikasi adalah kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti tentang suatu pesan yang dihadapi bersama antara pemberi pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan), yang pada umumnya berakhir dengan suatu efek atau hasil. Efek komunikasi merupakan segala perubahan yang terjadi pada komunikan sebagai akibat diterimanya suatu pesan dari komunikator.²¹

Secara umum, banyak ilmuwan sepakat bahwa komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian pesan dalam bentuk ide, gagasan, pikiran, perasaan, emosi, perilaku dan sebagainya. Dalam proses komunikasi, paling sedikit terdapat tiga unsur pokok, yaitu penyebar pesan, pesan dan penerima pesan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif/berhasil bila diantara penyebar dan penerima pesan terdapat suatu pengertian yang sama mengenai isi pesan. Komunikasi merupakan proses sosial, hal itu melibatkan sejumlah orang dalam interaksi, minimal melibatkan dua orang, pengirim dan penerima pesan. Hal itu tentu saja melibatkan intensitas, motivasi, dan kemampuan. Komunikasi ini akan terus berlangsung tanpa awal dan tanpa akhir sehingga komunikasi merupakan hal yang bersifat kompleks, dinamis, dan berubah secara kontinyu.²²

²¹ Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Perakteknya*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h 5

²² Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Perakteknya*, h 10

3. Teori Peran

Peran menurut Harton dan Hund adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Dalam karangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut struktur sosial, ditentukan oleh hakikat *nature* dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka diantara orang-orang yang memainkan dan terlibat dalam peran tersebut.

Menurut Levinson, mengatakan bahwa peran adalah satu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakat.

Secara etimologi menurut kamus bahasa Indonesia peran dapat diartikan sebagai tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu.²³

Dalam pengertian diatas, terkandung makna keterlibatan seseorang atau lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ataupun aktifitas usaha-usaha perorangan sendiri ataupun secara kelompok. Dalam kondisi yang demikian dapat dipahami bahwa keterlibatan maupun peran serta tersebut berkaitan dengan fungsi orang atau lembaga tersebut. Dengan kata lain makin tinggi

²³ Nopel Libut, "Peran Kepala Desa Dalam Menggalang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kab. Malinau", Jurnal *Pemerintahan* Volume 3 No 2 (2015), h 824

kedudukan atau keberadaan dan fungsi orang atau lembaga tersebut dalam masyarakat maka makin tinggi pula peranan yang dituntut partisipasi sebagai konskuensi dan tanggung jawab kehadiran orang atau lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Dengan memahami penjelasan-penjelasan diatas, setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan pembahasan masalah peran tersebut antara lain :

- a) Peran berkaitan dengan fungsi dan kedudukan seseorang di masyarakat, artinya bagaimana seseorang menjalankan peranannya amat ditentukan oleh kedudukannya dalam statifikasi sosialnya dimasyarakat, maka tinggi pula peranannya dalam kehidupan sosial.
- b) Peranan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, artinya bagaimana peranan seseorang tersebut dimasyarakat maka akan berdampak pula pada kewajiban dan hak yang melekat padanya.²⁴

4. Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan salah satu diantara konsep politik yang paling sering dipelajari dan dibahas oleh para akademisi dalam mempelajari ilmu politik. Sebagian sarjana atau ilmuwan politik beranggapan bahwa kekuasaan inti dari politik yaitu semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh dan mempengaruhi. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship*) dalam artian bahwa ada satu

²⁴ Nopel Libut, "Peran Kepala Desa Dalam Menggalang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kab. Malinau", Jurnal *Pemerintahan* Volume 3 No 2 (2015), h 824

pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (*the ruler and ruled*), satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah.

Dalam struktur politik, kekuasaan selalu terdistribusikan secara tidak merata didalam masyarakat. Secara sederhana distribusi kekuasaan dapat dijabarkan bahwa didalam setiap kehidupan sosial, selalu diwarnai oleh interaksi antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak adalah kelompok yang memiliki kekuasaan dan pihak lain adalah sebagai kelompok yang dikuasai, terlepas dari mana sumber kekuasaan yang ada diperoleh oleh penguasa. Dengan demikian kehidupan sosial selalu diwarnai oleh adanya dua kelompok, yakni penguasa dan pihak yang dikuasai, walaupun asumsi ini dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Akan tetapi, apapun alasannya asumsi ini juga pernah diikuti oleh banyak ahli untuk melihat gejala distribusi kekuasaan didalam masyarakat. Diantara penganut pendapat ini adalah para penganut pendapat ,Marxisme.²⁵

Penganut Marxisme memandang bahwa strata sosial didalam masyarakat terpilah dalam dua lisme kelas sosial yang terdiri atas kelas borjuis (pemilik modal produksi) dan kelas proletar (kelompok kelas bawah yang tidak memiliki modal produksi kecuali menjual tenaganya kepada kelompok berjuis). Dualisme kelompok sosial ini selanjutnya menempatkan kelompok berjuis sebagai kelompok yang menempati strata politik diatas kelas kelompok proletar, sebab kaum borjuis memiliki sumber kekuasaan otoritatif, yaitu kepemilikan modal produksi yang dapat digunakan

²⁵ Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group,2013),h 195

sebagai alat untuk mendominasi kelompok proletar yang berada dibawahnya. Bentuk dominasi berlebihan oleh kelas berojuis kepada proletar menimbulkan asumsi bahwa kehidupan sosial dipandang sebagai arena berbagi pertentangan antar kelas, sedangkan pemicu utama dari bentuk pertentangan tersebut adalah kesenjangan sosial.²⁶

Penganut Marxisme memandang masyarakat terdiri dari dualisme kelas sosial yang saling bertentangan, sehingga interaksi sosial yang ada hanya terjadi karena adanya paksaan dari kelas yang dominan atas kelas yang terdominasi yang ada didalam masyarakat. Kelas-kelas sosial dilihat sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan yang satu sama lain saling bertentangan. Bentuk pertentangan sosial ini oleh penganut paham non Marxisme dipaham sebagai bentuk kontradiksi intern. Kontradiksi intern tersebut bersumber pada kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian sumber-sumber sewcara tidak merata, sehingga menimbulkan dua macam kategori sosial dalam masyarakat, yaitu mereka yang tidak punya dan mereka yang punya.²⁷

Menurut Barbara Goodwin, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya (*force is the*

²⁶ Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group,2013),h 195

²⁷ Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*,),h 195

ability to cause someone to act in a way which she would not choose, left to herself. In other words to force someone to do something against her will).

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama (*power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former's own ends*)²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif metode ini mengharuskan peneliti meleburkan diri dalam aturan sosial yang ia teliti, mengamati orang-orang dalam lingkungan alami mereka, dan ikut serta dalam aktivitas mereka.²⁹ dengan memanfaatkan diri penulis dilapangan sebagai instrument kunci. Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskriptif nantinya untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni ilmu politik

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 60

²⁹ David Marsh Gerry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010), h 240

2. Lokasi penelitian

Adapun objek lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Kabupaten Pinrang. Desa Massewae adalah basis suara bapak Alimuddin Budung sehingga penulis tertarik meneliti di Desa tersebut, apa yang diberikan oleh bapak Alimuddin Budung kepada Masyarakat Desa Massewae yang banyak memberikan kontribusi suara sehingga menjadikannya sebagai anggota legislatif.

2. Sumber Data

A. Data primer

Data primer nantinya digunakan oleh penulis, apa yang dia dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

Data primer ini antara lain:

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang perilaku (verbal dan non verbal, serta percakapan/conversation)

B. Data Sekunder

Yaitu Data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder berupa buku-buku, skripsi, jurnal, laporan dan dokumen terkait biasanya didapatkan di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dan sebagainya.

3. Teknik PeNgumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah dirancang dalam instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya:

1. Bapak Alimuddin Budung sebagai legislator
2. Tokoh agama 1 orang
3. Tokoh pemuda 1 orang
4. Tokoh masyarakat 2 orang
5. Masyarakat desa 4 orang

Bentuk wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara. Menurut Sugiyono wawancara dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung (*face to face*) dan menggunakan teknik wawancara tak terstruktur (*Non Structured Interview*).³⁰

Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk menggali, memperoleh informasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Teknik library Research

Library Research, yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dan mengkaji buku dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik penulisan yang digunakan yaitu:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h 137

- 1) Kutipan langsung: mengutip bahan referensi kepustakaan tanpa merubah redaksi sedikitpun.
- 2) Kutipan tidak langsung : mengutip bahan referensi melalui perantara.³¹

C. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda, profil dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran legislator dan konstituen, peran legislator dalam pembangunan infrastruktur. Alat yang digunakan dalam dokumentasi penelitian ini adalah kamera untuk mengambil gambar (foto). Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Analisis

³¹ Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992) h. 10

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h 244

deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³³

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data.³⁴

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan , hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini Penyajian yang digunakan adalah bentuk teks. Dalam penyajian data maka akan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h 247

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h 249

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁵

c. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diuji menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau intraktif, hipotesis atau teori.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 249

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h 252-253

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Pinrang merupakan wilayah provinsi Sulawesi-Selatan dengan luas wilayah sebesar 196.177. Terdiri dari tiga dimensi wilayah meliputi dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Kabupaten Pinrang secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 kecamatan, 36 kelurahan dan 68 desa yang meliputi 81 lingkungan dan 168 dusun. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut:³⁶

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Enrekang dan Sidrap.
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pare-Pare.

Adapun Visi Misi Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

a. Visi Kabupaten Pinrang.

Visi Kabupaten Pinrang yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis melalui harmonisasi kehidupan akselerasi produktivitas kawasan, dan revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional.

³⁶ Profil Kabupaten Pinrang tahun 2014

b. Misi Kabupaten Pinrang

- 1) Meningkatkan apresiasi dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang teguh.
- 2) Memperkokoh toleransi, solidaritas dan kohesifitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia.
- 4) Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- 6) Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan.
- 7) Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup.³⁷

B. Gambaran umum Kecamatan Duampanua

Kecamatan Duampanua merupakan salah satu kecamatan di Kab Pinrang dengan luas wilayah sebesar 291,86 merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lembang dibagian barat, Kecamatan Batulappa dibagian utara, Kecamatan Patampanua dibagian timur dan Kecamatan Cempa dibagian selatan. Kecamatan Duampanua terdiri dari 15 Desa/Kelurahan.³⁸

³⁷ Profil Kabupaten Pinrang tahun 2014

³⁸ Profil Kec. Duampanua Kab Pinrang tahun 2015

C. Gambaran umum Desa Massewae

1. Profil Desa Massewae

Awal mula terbentuknya Desa Massewae adalah pada tahun 1989 dengan status Desa persiapan yaitu dari hasil pemekaran Desa Kaballangan dan Desa Batulappa, Desa Kaballangan wilayah nya dibagi menjadi tiga yaitu Desa Kaballangan, Desa Katompurang dan Desa Massewae. Desa Batulappa wilayahnya dibagi menjadi tiga desa yaitu Desa Batulappa, Desa Tapporang, dan Desa Massewae. Masing-masing wilayah kedua desa induk diambil sebahagian dan digabungkan yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Desa Massewae. Massewae berasal dari kata *Massewwae* yaitu bahasa bugis yang artinya *persatuan dan kesatuan* dengan harapan agar masyarakat Desa Massewae menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pembangunan dan kehidupan keseharian. Sampai pada saat ini Desa Massewae sudah dipimpin oleh empat orang kepala Desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa pertama yaitu Abd.Halim Duda sejak tahun 1989-1993 dengan status desa persiapan.
2. Kepala Desa kedua yaitu Abd Rahman sejak tahun 1993-2001 dengan status desa definitif.
3. Kepala Desa ketiga yaitu M Nawir Abidin sejak tahun 2001-2013 dengan status desa sedang berkembang.

4. Kepala Desa ke empat yaitu Ibrahim S sejak tahun 2013-sekarang.³⁹

2. Visi Misi desa Massewae

1. Visi Desa Massewae

Visi Desa Massewae yaitu terwujudnya Desa mandiri yang memiliki SDM yang relegius dan berkualitas dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi melalui sektor pertanian dan agrobisnis dan usaha kecil menengah yang peroduktif dan berwawasan lingkungan didalam karangka demokratisasi.

2. Misi Desa Massewae

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioprasionalkan/dikerjakan sebagai penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Massewae, sebagai peruses yang dilakukan maka misi desa massewae adalah :

1. Membangun pemerintah desa yang bersih, adil, transparan dan demokratis untuk meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap program-perogram pembangunan pemerintahan desa.
2. Membangun komunikasi dan kerja sama yang sinergis dengan semua lembaga yang ada didalam masyarakat desa maupun lembaga, instansi pemerintahan, organisasi, perusahaan, bahkan individu yang ada di luar desa yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian Visi

³⁹Profil Desa Massewae tahun 2014

3. Membangun kereatifitas masyarakat untuk menggali potensi gagasan, prakarsa dan motivasi dari masyarakat itu sendiri guna memunculkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab untuk membangun Desa dengan suadaya melalui pendekatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Mewujudkan peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan.
5. Menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang bernuansa islami.
6. Membangun rasa kebersamaan dan persatuan.
7. Efektifitas program pelatihan dan penyuluhan.
8. Mengusahakan pembangunan sarana dan perasarana secara bertahap.
9. Mengusahakan modal pemberdayaan untuk peningkatan usaha masyarakat.
10. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efektif dan terukur untuk kepentingan pembangunan desa.
11. Membangun kinerja yang terorganisir sehingga dapat berjalan secara efisien dan berkesinambungan.

3. Kondisi umum Desa Massewae

a. Geografis dan letak wilayah

Secara geografis Desa Massewae merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kec Duampanua Kab. Pinrang yang terletak berada di perbatasan dengan Kecamatan Patampanua. Desa Massewae adalah salah satu desa dari 15 desa dalam wilayah Kec. Duampanua Desa Massewae terletak 14 KM dari jantung kota

kabupaten Pinrang kearah utara dan 10 KM dari ibu kota Kecamatan Duampanua kearah selatan. Adapun batas wilayah Desa Massewae adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batulappa.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Saddang (seberang Kec. Cempa)
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tapporang.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaballangan

Desa Massewae mempunyai luas wilayah seluas 44,20 Km² terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kaluppang, Dusun Pakoro dan Dusun Lome.⁴⁰

b. Iklim

Iklim Desa Massewae adalah tropis, sebagaimana desa- desa lain diwilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Massewae Kec Duampanua.⁴¹

3. keadaan sosial ekonomi

a. Jumlah penduduk

Desa Massewae mempunyai jumlah penduduk 3.033 jiwa yang terdiri dari 1466 jiwa orang laki-laki dan 1567 jiwa orang perempuan , jumlah penduduk tersebut terdiri dari 814 kepala keluarga yang tersebar dalam tiga dusun yaitu.⁴²

⁴⁰Profil Desa Massewae tahun 2014

⁴¹ Profil Desa Massewae tahun 2014

⁴² Profil Desa Massewae tahun 2014

Tabel 2. Jumlah Penduduk

Dusun Kaluppang	Dusun Pakoro	Dusun Lome	Jumlah
1.296 orang	815 orang	922 orang	3.033

Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa ke tiga dusun tersebut jumlah tiap penduduknya berbeda-beda, Dusun Kaluppang mempunyai penduduk terbanyak, kemudian Dusun Lome dan Dusun Pakoro jumlah penduduknya paling sedikit.

b. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Massewae adalah sebagai berikut:⁴³

Tabel 3. Tingkat Pendidikan

Pra sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
599 orang	1370 orang	585 orang	456 orang	23 orang

Sesuai dengan tabel diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Massewae terbilang rendah karena rata-rata penduduknya tidak sekolah, sebagian hanya menempuh sampai tingkat sekolah dasar dan tingkat sarjananya hanya 23 orang saja.

c. Pencaharian

Desa Massewae merupakan Desa pertanian maka sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut⁴⁴

Tabel 4. Mata Peneharian

Petani	Nelayan	Pedagang	PNS/TNI/POLRI	Buruh	Lain-lain
500 KK	5 KK	107 KK	36 KK	51 KK	119 KK

⁴³ Profil Desa Massewae tahun 2014

⁴⁴Profil Desa Massewae tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk Desa Massewae bermata pencaharian sebagai petani dan sebahagian yang lain menjadi nelayan, pedagang dan pegawai negeri.

3. Kebijakan Pembangunan

a. Arah kebijakan pembangunan Desa Massewae

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi dan kondisi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, bagi perempuan maupun laki-laki.⁴⁵

Usaha pengentasan kemiskinan hendaknya disadari merupakan kewajiban semua pihak, bagian dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pemerintah yang tidak bisa disekat dengan waktu, karena kemiskinan itu sendiri bagian dari ornamen dunia yang tidak mungkin dapat dibebaskan. Tugas yang ada pada kita adalah

⁴⁵ Profil Desa Massewae tahun 2014

mengurangi jumlah agar tidak terjadi kesenjangan yang tidak terlalu tajam antara yang kaya dan yang miskin selaras dan makin meningkatnya standar kualitas hidup manusia.⁴⁶

Sarana pembangunan Desa Massewae dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sarana tersebut adalah:

- 1) Menurunnya penduduk (KK miskin) yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2015.
- 2) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
- 3) Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
- 4) Tersedianya kemudahan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu bagi orang miskin.
- 5) Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.
- 6) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.
- 7) Terbukanya akses permodalan dalam menciptakan dalam mengembang usaha.
- 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa dan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif.

⁴⁶ Profil Desa Massewae tahun 2014

- 9) Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

b. Program pembangunan Desa Massewae.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di Desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata.

Tabel 5. Program Pembangunan desa⁴⁷

No	Bidang/Jenis Kegiatan	Volume	Keterangan
1	Penimbunan dan proteksi jalan SDN 263	800 m	
2	Penimbunan jalan Lamorro	2500 m	
3	Pengerasan jalan perkampungan	500 m	
4	Pengaspalan jalan dusun	1.000 m	
5	Perintisan jalan untuk penataan perkampungan	1.000 m	
6	Perintisan jalan dikawasan HTR	4.000 m	
7	Pembangunan drainase	1.000 m	
8	Pembangunan duicker	5 unit	
9	Pembuatan sumur umum dan MCK	1 unit	
10	Proyek air bersih Ulu Tau	1 unit	
11	Rabat beton jalan	1,000 m	
12	Pemasangan jaringan listrik di kampong Pappasaran	22 kk	
13	Pengadaan jembatan kayu	12 m x 3 m	

⁴⁷ Profil Desa Massewae tahun 2014

14	Pengadaan jembatan kayu jalan tani	3 m x 2 m	
15	Pengadaan jembatan kayu di Pukapuka dan Ulu Galung	3 unit	
16	Pengadaan perpustakaan Desa	3 m x 4 m	
17	Drainase	300 m	
18	Saluran pembuangan	1.000 m	
19	Perintisan jalan alternatif antar Desa	5.000 m	
20	Rabat beton jalan Pekuburan	500 m	
21	Rabat beton jalan Pendidikan	300 m	
22	Rabat beton jalan Lamorro	2.000 m	
23	Renovasi kantor desa	1 unit	

Tabel diatas menunjukkan program pembangunan desa kedepannya mulai dari sarana-prasarana desa dan juga pada program perbaikan infrastruktur.

4. Sarana dan prasarana Desa

a. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Massewae secara garis besar adalah sebagai berikut.⁴⁸

Tabel 6. kondisi sarana dan prasarana umum

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Baik	
2	Posyandu	3	Kurang	
3	Poskamling	2	Rusak	
4	Poskesdes	1	Baru	
5	M.Ts	1	Baik	
6	Sekolah Dasar	3	Sedang	

⁴⁸ Profil Desa Massewae tahun 2014

7	Masjid	3	Baik	
8	Mushallah	1	Sedang	
9	Lapangan sepak bola	1	Baik	
10	Gedung olah raga	1	Sedang	
11	Gedung TPA	1	Sedang	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana- prasarana desa tidak semua dalam kondisi yang baik, karena sebahagian sudah ada yang kurang baik bahkan sudah ada yang rusak.

b. Kondisi pemerintahan Desa

Nama Desa : Massewae

Kota/Kab : Pinrang

Provinsi : Sulawesi Selatan

Alamat kantor : Jln. Poros Pinrang Polman Km. 13

Batas wilayah : Utara : Desa Batulappa

Selatan: Sungai Saddang (Kec Cempa)

Barat : Desa Kaballangan

Timur : Desa Tapporang

Jumlah Dusun/Lingkunan : 3 Dusun

Junlah RK : 6 RK

Jumlah Penduduk : 3.033 jiwa

Laki-Laki :1,466 jiwa

Perempuan : 1.567 jiwa

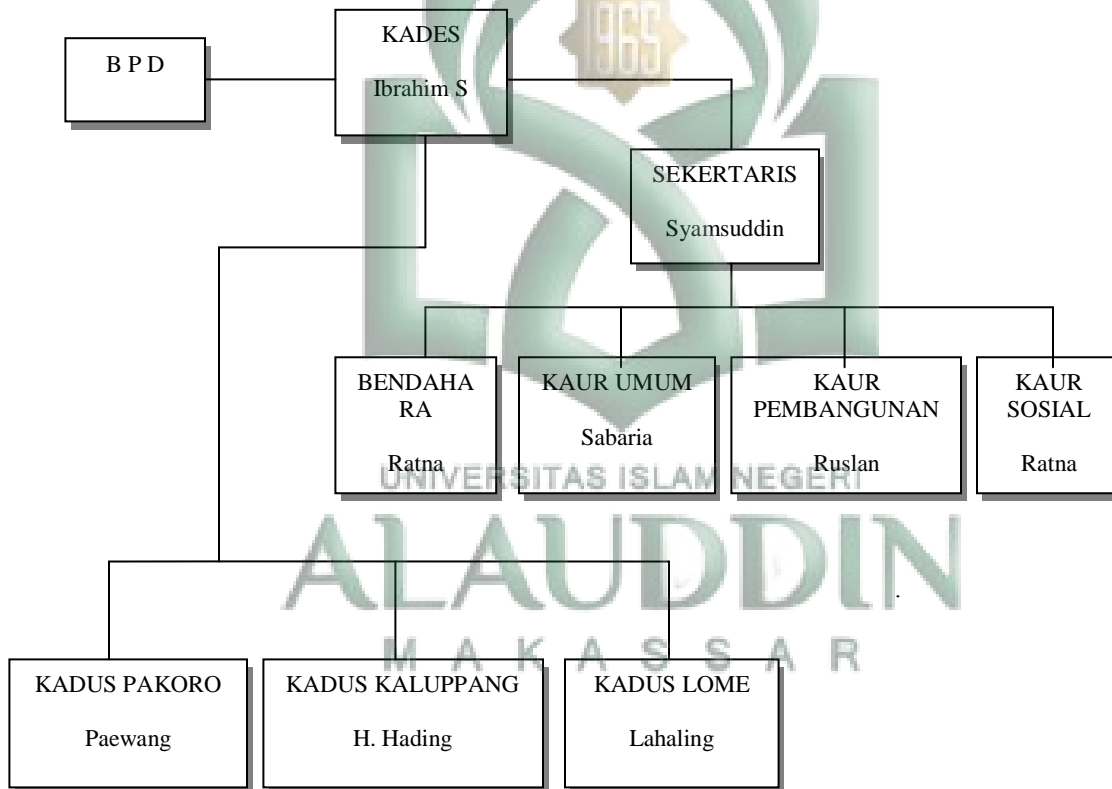
Penduduk Dewasa : 2.214 jiwa

Kepala Keluarga

:814 KK⁴⁹

c. Struktur Organisasi Desa

Desa Massewae menganut sistem kelembagaan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut.⁵⁰



d. Profil Alimuddin Budung

Alimuddin Budung lahir di Desa Salukalobe 10 September 1976 dan bersekolah di SDN 130 Tuppu, setelah lulus di sekolah dasar melanjutkan pendidikannya di pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangang selama 6

⁴⁹ Profil Desa Massewae tahun 2014

⁵⁰ Profil Desa Massewae tahun 2014

tahun dalam menempuh pendidikan ia pernah menjabat sebagai ketua osis SMP dan SMA, kemudian di percaya oleh anre gurutta Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai murid *mareppena gurutta*. Kemudian melanjutkan studi pendidikan di IAIN Alauddin Makassar di bidang ilmu Jinaya Siasah Fakultas Syariah dan Hukum. Selama perkuliahan pernah menjabat sebagai wakil ketua senat, ketua ikatan mahasiswa darudda'wah wal irsyad (IMDI), dan menjadi ketua kerukunan mahasiswa pinrang (KMP). Setelah lulus ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan yaitu gerakan pemuda ansor, komite nasional pemuda Indonesia (KNPI), dan peringatan hari besar islam.

Pada saat melanjutkan pendidikan untuk strata dua di universitas muslim Indonesia ia ditawarkan oleh pengurus wilayah PBNU untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif pada tahun 2009 dan melalui kendaraan partai kebangkitan bangsa (PKB). Melalui proses panjang demokrasi masyarakat memberi amanah untuk menjadi wakil rakyat dengan perolehan suara kurang lebih 1000 suara dan dipercayakan untuk duduk di komisi 1 yaitu membahas masalah pemerintah dan pendidikan. Pada tahun ketiga masa kerjanya ia berpindah pada komisi 3 yaitu masalah pekerjaan umum. Kemudian pada tahun 2014 kembali terpilih menjadi anggota legislatif dengan kendaraan partai yang sama yaitu partai kebangkitan bangsa (PKB) dengan perolehan suara kurang lebih 1400 suara, dan masih pada komisi yang sama.

Pada masa kampanye ia mengedepankan hubungan silaturahmi antara masyarakat. Menjalin hubungan kekerabatan yakni dalam kasih sayang, tolong menolong dan saling berbuat baik. Karena dengan menyambung tali silaturahmi itu bisa mendekatkan diri dengan masyarakat luas.



BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Peran Alimuddin Budung sebagai legislator dalam pembangunan infrastruktur Desa Massewae.

Politik merupakan kegiatan dan intraksi manusia yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum ini disebut keputusan politik. Keputusan politik pada dasarnya merupakan distribusi dan alokasi kemanfaatan dan beban. Jika politik dipandang sebagai proses yang didalamnya terdapat beban yang didistribusikan dan dialokasikan kepada masyarakat, maka faktor utama yang mempengaruhi distribusi dan alokasi beban dan kemanfaatan adalah kekuasaan (power). Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan politik kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan.⁵¹

Sumber-sumber kekuasaan dan kewenangan adalah sesuatu yang menjadi dasar atau sebab yang digunakan seseorang atau sekelompok kecil orang memiliki pengaruh pada perilaku orang atau kelompok lain. Dalam hal ini Ramlah Surbakti memaparkan beberapa sumber yang menjadikan seseorang atau sekelompok kecil

⁵¹ Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2013), h 189

orang berkuasa atas orang lain di antaranya: sarana paksaan fisik, kekayaan, normatif, popularitas, status sosial, keahlian, massa yang terorganisasi, jabatan dan perss. Secara ril memang diketahui bahwa seseorang atau sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber tersebut sedikit atau banyak memiliki pengaruh dalam proses politik.⁵²

Secara prinsipil setiap wakil tentunya melihat dirinya sebagai mewakili warga Negara yang berada didalam batas wilayah lingkungan perwakilan secara keseluruhan. Karena itu para wakil disebut wakil rakyat. Akan tetapi secara operasional amatlah sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, sebab wakil tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga Negara yang diwakilnya. Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangkan tingkat keterwakilan dengan daerah operasionalisasi hubungan perwakilan politik secara memadai, ialah dengan menggunakan metode pemusatan perhatian. Ada tiga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil, yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Apabila pemusatan perhatian yang pertama dan yang kedua disebut sebagai perwakilan yang berfokus fungsional, maka yang terakhir disebut berfokus regional.⁵³

⁵² Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2013), h 190

⁵³ Toni Andirus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h 103-104

Penyelenggaraan pembangunan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam terlaksananya pembangunan ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif, dan relationsip. Karena pembangunan tidak berjalan secara optimal tanpa adanya hubungan sinergis antara pelaku dan objek pembangunan. Apalagi proses pembangunan kedepan cenderung akan semakin mengurangi peran pemerintah seiring semakin besarnya peran masyarakat.⁵⁴

Konsep pembangunan yang dikembangkan selama ini, antara kota dan desa tidak dapat terhindarkan dalam teori dan pelaksanaannya yang banyak menimbulkan masalah dalam implementasinya, misalnya adalah pencapaian tujuan pembangunan yang tidak optimal atau menetapkan indikator pembangunan yang cenderung lebih tinggi bagi kemajuan pembangunan pedesaan.⁵⁵

Pada umumnya masyarakat pedesaan mengalami masalah di Desa yaitu tentang pembangunan infrastruktur yang kurang mendukung seperti akses jalan, baik itu berupa jalan antar desa ke desa maupun akses jalan pertanian. Berdasarkan alasan itu dapat diketahui bahwa di pedesaan masalah paling banyak dihadapi dan perlu adanya pemecahan masalah adalah tentang infrastruktur jalan yang berakibat kurang

⁵⁴ Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h 223

⁵⁵ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h 88

lancarnya transportasi, karena dengan kurangnya transportasi maka komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, demikian pula dengan distribusi komoditi pangan baik yang ada di desa maupun yang diperlukan di desa tidak menjadi lancar.

Solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi permasalahan ini adalah antara eksekutif, legislatif dan masyarakat perlu bersama-sama memecahkan permasalahan ini mengingat besarnya dana yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah, secara bersama-sama fokus dalam mengatasi masalah pembangunan infrastruktur.
- b. Masyarakat desa bisa bersama-sama dengan melakukan gotong royong membangun jalan guna membuka akses mengingat masyarakat pedesaan mempunyai sumber daya berupa sifat gotong-royong.⁵⁶

Hal inilah yang diperjuangkan oleh salah satu anggota legislatif yaitu bapak Alimuddin Budung untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan melalui pembangunan infrastruktur di pedesaan, seperti yang diungkapkan oleh narasumber utama bapak Alimuddin Budung selaku anggota legislatif sebagai berikut.

“Kebetulan saya berada dikomisi tiga yang membahas masalah pekerjaan umum (PU). Bidang tugas PU kami harus tangani kira-kira apa asas manfaatnya dimasyarakat kalau asas manfaatnya bagus maka kita akan dukung, kalau tidak maka ada perbaikan. Nah disitulah dibutuhkan ada sinergitas perencanaannya bagaimana. Karna anggarannya kan melekat pada DPR maka kita akan melihat kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan karna analisisnya ini berada di DPR sebagai pemegang anggaran. Terus klo kita berbicara masalah perda itu perwakilannya dari

⁵⁶ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h 86

*fraksi yang diutus dimana sesuai dengan spesifikasi ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang namanya pro dan kontra pasti muncul tidak ada semulus yang diinginkan tetapi ini di butuhkan keserasian cara berfikir pandang kita bagaimana supaya ini bisa diterima oleh masyarakat tetapi derafatnya itu tetap dari eksekutif nanti penjabarannya setelah dikonsultasikan maka disitulah fungsinya DPR sebagai pengawal dari pada perda yang ada diwilayah itu”.*⁵⁷

Pendapat tersebut sesuai dengan fungsi badan legislatif yaitu 1. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang *budget* atau anggaran. 2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.⁵⁸

Sebagai anggota legislatif yang mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat.⁵⁹ Karena kepercayaan dari masyarakat dimana masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada sosok yang dianggap layak untuk mewakilinya dan besar harapan dapat membawa perubahan khususnya didalam bidang pembangunan infrastruktur.

⁵⁷ Alimuddin Budung (45 tahun) Anggota Legislatif Kab. Pinrang, Wawancara, Massewae, 27-9-2016

⁵⁸ Miriam Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 322

⁵⁹ Miriam Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, h 327

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Alimuddin Budung mengenai pembangunan infrastruktur desa.

*“Mungkin kalau saya sampaikan masalah kinerja dalam pembangunan itu bisa disebut dalam bahasa agama riya (memuji diri sendiri). Akan tetapi kami genjot yang namanya pembangunan khususnya di daerah pemilih ini bukti nyata sudah dimulai perbaikan jalan sebagai tanggung jawab saya dalam melaksanakan tugas anggota DPRD dan ini menunjukkan bentuk kemitraan yang kami bangun. Kemudian kami juga membangun jembatan untuk akses pertanian masyarakat pada saat ada hasil gabah, jagung, dan kayunya masyarakat itu sudah bisa melintas. Lanjut dari itu lapangan bola bagian dari pada komunikasi yang kami bangun dengan kementerian pemuda dan olahraga dan Alhamdulillah dibangun untuk perbaikan lapangan sepak bola”.*⁶⁰

Pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan dan jembatan bertujuan agar masyarakat bisa lebih bergerak secara dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang kurang memadai sangat memberi dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut tanggapan salah satu masyarakat tentang peran Alimuddin Budung dalam pembangunan infrastruktur di Desa Masseawae yaitu bapak Sarifuddin umur 51 tahun pekerjaan sebagai petani.

*“Masalah pembangunannya saya akui karna sudah beberapa lorong-lorong yang ada di depan rumah masyarakat ini sudah diaspal artinya dia betul-betul bekerja untuk rakyat”.*⁶¹

⁶⁰ Alimuddin Budung (45 tahun) Anggota Legislatif Kab. Pinrang, Wawancara, Massewae, 27-9-2016

⁶¹ Samsuddin (51 tahun) Masyarakat Desa Massewae, Wawancara, Massewae, 28-9-2016

Penadapat serupa dengan yang dikatakan oleh masyarakat Desa Massewae bapak Ridwa mengenai peran Alimuddin Budung umur 49 tahun pekerjaan sebagai petani.

*“Kalau pembangunannya itu sudah nampak, bantuan pembangunan seperti jembatan pertanian dan pengaspalan di lorong-lorong, itu bentuk perjuangannya sebagai anggota legislatif”.*⁶²

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan langkah-langkah menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah tanpa adanya infrastruktur yang memadai, cenderung suatu daerah akan mengalami pertumbuhan yang melambat. Infrastruktur menjadi faktor utama dalam pertumbuhan suatu desa dengan adanya infrastruktur yang memadai maka akan mempermudah akses masyarakat.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya seperti pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana-prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial

⁶² Ridwan (49 tahun) Masyarakat Desa Massewae, Wawancara, Massewae, 28-9-2016

kemasyarakatan dan meningkatkan eksesitabilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar daerah.⁶³

Legislator merupakan wakil rakyat yang harus memberikan dorongan dan motivasii kepada masyarakat dalam tercapainya masyarakat sejahterah. Dalam masa jabatannya, legislator harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan semangat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sejahterah. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan khususnya dibidang infrastruktur yang ada di daerah pilihnya dalam hal ini konstituen.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Syamsuddin umur 46 tahun pekerjaan sekertaris Desa Massewae

*“Kalau pembangunannya sudah nampak dan biasanya memberikan bantuan atau istilanya sebagai organisasi kemasyarakatan, karna dia adalah salah satu anggota legislatif memberikan dorongan, motivasii dan memberi bantuan apa bila ada yang mau dibangun”.*⁶⁴

Sebagai legislator memang sudah seharusnya memiliki peran aktif dalam menggerakkan masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Kegiatan memberikan dorongan atau motivasii sangatlah penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terutama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan yang memerlukan adanya dukungan, agar supaya masyarakat bisa lebih aktif. Dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai, faktor motivasi sangatlah penting sebab

⁶³ Selomi Johan, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kabupaten Malinau”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 3 No 2 (2015) h, 881

⁶⁴ Syamsuddin (46 tahun) Sekertaris Desa Massewae, *Wawancara*, Massewae, 29-9-2016

motivasi sangatlah berpengaruh untuk mendorong mental masyarakat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Dengan memberikan motivasi yang tepat tujuan mendorong masyarakat yang menjadi adil dan makmur tidaklah mustahil akan terwujud.

Demikian pula halnya dengan anggota legislatif, dimana anggota legislatif ini merupakan wakil dari rakyat. Harus memberikan kinerja yang betul-betul diperuntuhkan kepada rakyat. Untuk itulah sebagai wakil rakyat harus memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat dalam hal ini konstituen untuk ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Tanggapan Alimuddin Budung dalam melihat pembangunan infrastruktur di Pinrang kedepannya. Artinya kita sudah mulai hari ini, tetapi penataannya harus jelas. Penataan yang kita mau bangun yaitu penataan mulai dari persoalan pembangunan infrastruktur. Supaya semua perekonomian yang ada di desa itu bisa secepat mungkin diakses oleh pasaran, sehingga kedepannya visi misi tentang persoalan infrastruktur pembangunan sejak dini kita lakukan dan itu tidak bisa statis tetapi itu dinamis terus. Karena pembangunan kedepan ini kita harus mengolah bersama, mensejajarkan dengan kabupaten-kabupaten yang maju, kita ingin supaya Kabupaten Pinrang tidak begitu staknan tetapi kita mau pola pembangunan berjalan terus.

Merujuk dari beberapa wawancara yang ada di atas yaitu Alimuddin Budung dan masyarakat penulis berpendapat bahwa peran Alimuddin Budung dalam pembangunan infrastruktur ini sudah mengarah terhadap visi-misi Kabupaten Pinrang pada umumnya yaitu pada poin ke 7 mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan

lingkungan hidup. Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi fungsi infrastruktur pedesaan. dan visi-misi Desa Wassewae khususnya yaitu terdapat pada poin ke 8 mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap. Walaupun di beberapa desa khususnya di daerah pemilihannya belum ada bentuk bantuan pembangunan infrastruktur hal ini dikarenakan, disamping skala dapil itu cukup luas meliputi tiga kecamatan yaitu Duampanua, Batulappa dan Kecamatan Lembang juga mengalami kendala dibagian anggaran. Peran Alimuddin Budung dalam pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan komisi yang ia pegang yaitu komisi tiga. Jadi semua hal yang menyangkut bidang tugas pekerjaan umum (PU) harus ditangani sebagai bentuk konskuensi yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan tugas.

B. Relasi antara Alimuddin Budung dengan masyarakat di Desa Masewae.

1. Interaksi sosial antara Alimuddin Budung dengan masyarakat.

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara langsung tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu,

intraksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, dan saling berbicara. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial, walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menegur tanda-tanda interaksi sosial telah terjadi, oleh karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan perasaan.⁶⁵ Berikut kutipan wawancara dengan Alimuddin Budung mengenai intraksi sosialnya dengan masyarakat.

*“Sebagai wakil rakyat interaksi sosial dengan masyarakat harus terjalin dengan baik dan kami sangat mengedepankan yang namanya bersilaturahmi dengan warga masyarakat, dimanapun kita berada baik itu di mesjid di jalanan atau tempat lain, sekurang- kurangnya kita saling bertegur sapa dengan sesama”.*⁶⁶

Dengan memelihara tali silaturahmi, hubungan sosial yang terjalin akan semakin dekat, dalam melakukan silaturahmi dapat meningkatkan hubungan kepercayaan antara seseorang dengan orang lain. Apalgi antara legislator dan konstituennya hubungan interaksi sosial harus terus berjalan.

Interaksi sosial adalah titik awal berlangsungnya suatu peristiwa sosial. Menurut Gillin intraksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara orang perorangan, dengan kelompok manusia. Intraksi sosial dapat pula dilihat sebagai proses dimana orang mengorientasikan dirinya pada orang

⁶⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaja, 2004), h 61

⁶⁶ Alimuddin Budung (45 tahun) Anggota Legislatif Kab. Pinrang, Wawancara, Massewae, 27-9-2016

lain dan bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain.

Dalam kehidupan bersama antara manusia dan manusia atau kelompok manusia dan kelompok tersebut terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan tersebut seseorang ingin menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginannya masing-masing. Sedangkan untuk mencapai keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang disebut dengan hubungan interaksi. Interaksi terjadi apa bila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu yang lain.⁶⁷

Sebagai manusia kita mempunyai naluri untuk senang tiasa berhubungan dengan sesama. Hubungan yang sinambung tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan pola berfikirnya. Pola berfikir tertentu yang dianuti seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat kepada manusia, benda atau keadaan.⁶⁸ Berikut kutipan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak Lahaling umur 60 tahun pekerjaan petani tentang intraksi yang dibangun oleh bapak Alimuddin Budung dengan masyarakat.

⁶⁷ Hasnawiyah, "Interaksi Sosial Antara Pemimpin Dengan Karyawan Pada Toko Buku Gramedia di Samarina", Jurnal *Sosiologi* Volume 4 No 1 (2016), h 47

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaja, 2012), h 103

*“Apabila bertemu dengan masyarakat dia tidak membedakan strata sosial yang ada, senang duduk berdiskusi dengan warga dan selalu mengutamakan sopan satun bahkan tidak ada perbedaan antara sebelum menjabat sebagai anggota legislatif dan setelah menjabat sebagai anggota legislatif”.*⁶⁹

Merujuk pada wawancara diatas Sebagai wakil rakyat Alimuddin budung senang berinteraksi dengan masyarakat itu berarti interaksi sosial yang dibangun sudah maksimal. Dengan demikian jarak antara legislator dan konstituen semakin dekat. Didalam menjalankan kewajibannya ia tidak membedakan strata sosial yang ada pada masyarakat, hal ini tentu dapat membawa pengaruh positif terhadap perannya sebagi legislator. Ditambah lagi sebelum menjabat dan setelah menjabat tidak ada perbedaan sikap terhadap konstituennya.

Pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh saudara Anto umur 27 tahun pekerjaan sebagai petani

*Melihat hubungan yang terjalin dimasyarakat disini ada sedikit kekecewaan, karena tim-tim pemenangan dari lawan politik bapak Alimuddin Budung ini sedikit ada kesenjangan dimana terdapat perbedaan sikap dalam berinteraksi. Artinya disini apa bila pendukungnya, hubungan sosial kemasyarakatan itu dekat beda dengan lawan politiknya sedikit ada jarak.*⁷⁰

Merujuk dari pendapat diatas sebagai legislator seharusnya tidak boleh membedakan antara kawan maupun lawan. pada saat telah terpilih menjadi wakil rakyat, persoalan-persoalan yang dihadapi ketika peroses pemilu itu harusnya dikesampingkan dan ketika sudah menjabat sebagai legislator hubungan yang dijalin

⁶⁹ Lahaling (60 tahun) Masyarakat Desa Massewae, Wawancara, Massewae, 28-9-2016

⁷⁰ Anto (27 tahun) masyarakat Desa Massewae, wawancara, Massewae, 28-9-2016

dengan konstituen terkhusus lawan politik seharusnya berjalan sebagaimana interaksi yang dibangun dengan pendukung pada saat proses pemilu dan tanpa ada perbedaan.

Secara substansial, perwakilan berarti adanya para wakil yang bertindak sebagaimana kepentingan atau yang diinginkan oleh orang-orang yang diwakilinya. Secara kelembagaan, sudah diupayakan untuk membangun relasi yang lebih baik antara wakil dengan yang terwakili. Adanya sistem pendapilan yang dimulai sejak pemilu 2004, merupakan contohnya. Melalui sistem ini, bisa teridentifikasi lebih jelas siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil bisa menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga bisa mengetahui siapa yang mewakili mereka dan daerahnya, baik di DPR maupun DPRD.⁷¹

Disamping itu secara kelembagaan, para wakil juga didorong untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihnya masing-masing, baik pada masa reses maupun pada saat hari kerja. Program itu disebut program aspirasi masyarakat. Melalui program ini, para wakil rakyat bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang serius dihadapi oleh masyarakat di daerah pemilihnya. Pada saat itu, masyarakat juga bisa menyalurkan aspirasi yang dimilikinya secara langsung.⁷²

Diharapkan melalui kegiatan semacam itu para wakil rakyat berusaha memperjuangkan kepentingan dan berupaya menyelesaikan permasalahan di daerah

⁷¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2001), h 52

⁷² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, h 53

pemilihnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama pemerintah. Para wakil rakyat juga bisa menyalurkan jalan pemecahannya melalui institusi-institusi yang terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.⁷³ Berikut seperti yang diungkapkan oleh bapak Alimuddin Budung sebagai wakil rakyat dalam sebuah wawancara dengan penulis

“Berbicara mengenai aspirasi ini sudah menjadi tugas kami Sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, dan hampir 7 tahun ini kami menjabat sebagai legislator selalu jalan sebagai orang yang memang senang berkomunikasi dengan masyarakat, hampir seluruh coba saya perjuangkan karna saya juga kemari sebagai aktifis pastilah saya tidak pernah gentar kalau memperjuangkan aspirasi di kantor karna ini adalah bagian dari perpanjangan tangan dan inilah tugas amanah yang rakyat berikan kepada kami dan saya membuktikan kepada masyarakat bahwa bapak telah memberikan amanahnya kepada kami dan akan dilaksanakan dengan baik.”⁷⁴

Mengutip pembicaraan yang ada diatas memang seharusnya sebagai wakil rakyat harus mendengar dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang ada pada masyarakat karna mengingat merekalah yang memberi mandat dan sebagai rakyat yang harus diwakili di dalam bidang pemerintahan.

Kerangka kelembagaan dirancang agar para wakil rakyat lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di daerah pemilihannya masing-masing, yakni melalui proses pengumpulan berbagai masukan dan memperjuangkannya melalui keputusan-keputusan politik. Selain itu, secara politik mekanisme kelembagaan seperti itu juga memungkinkan akuntabilitas dari wakil rakyat. Secara politik, wakil

⁷³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2001) h 53

⁷⁴ Alimuddin Budung (45 tahun) Anggota Legislatif Kab. Pinrang, *Wawancara*, Massewae, 27-9-2016

rakyat dikatakan akuntabel ketika masyarakat memberi hadiah untuk memilihnya kembali sebagai wakil rakyat pada pemilu berikutnya. Sebaliknya, dikatakan tidak akuntabel ketika mereka gagal memperoleh mandat kembali.⁷⁵

Melalui desain semacam itu, relasi antara para wakil rakyat sebagai *agen* dengan para pemilih sebagai *principal*, diharapkan bisa lebih melembaga. Sebagai *agen*, para wakil rakyat diharapkan lebih banyak mendengar, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan konstituen yang diwakilinya. Sementara itu konstituen sebagai *principal* diharapkan bisa lebih inteks melalui pengawasan, dan bisa member *reward* dan *punishment* kepada para wakil. Manakala para wakil bekerja cukup baik untuk rakyat, bisa diberi *reward* melalui keterpilihan kembali. Sebaliknya, ketika tidak bekerja untuk rakyat, dihukum dengan ketidak terpilihan kembali.⁷⁶

2. Pola komunikasi Alimuddin Budung dengan masyarakat.

Istilah komunikasi memang sudah menjadi bagian keseharian kehidupan manusia, ketika orang berpidato, berceramah atau mengungkapkan pikiran dan perasaannya, baik melalui media massa atau tidak, banyak pihak menganggap bahwa orang tersebut sedang berkomunikasi. Ketika sekelompok orang atau kerumunan orang berdiskusi, baik di televisi maupun dalam ruangan rapat, bahkan diwarung kopi sekalipun, itu pun dapat dikatakan sedang berkomunikasi.⁷⁷

⁷⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2001), h 53

⁷⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, h 54

⁷⁷ Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h 1

Inti komunikasi adalah manusia. ketika manusia ada, semua lini kehidupan manusia tersebut adalah komunikasi. Dalam konteks ini lah, manusia dianggap makhluk paling sempurna karena dapat melahirkan komunikasi. Semua hal dapat dipersepsi sebagai komunikasi jika manusia mempresepsikan sebagai komunikasi sehingga presepsi komunikasi ini selalu mengikuti aturan yang dibuat.⁷⁸

Dalam peroses komunikasi paling sedikit terdapat tiga unsur pokok, yaitu penyebar pesan, pesan, dan penerima pesan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif/berhasil bila diantara penyebar dan penerima pesan terdapat suatu pengertian yang sama mengenai isi pesan. Isi pesan disampaikan melalui penyebar pesan.

Pada awalnya, komunikasi berada dalam lingkup sederhana dan dalam skala sempit. Namun, seiring berkembangnya ummat manusia yang terus melaju, komunikasi mulai dihadapkan pada problem yang bertambah kompleks dan rumit. Proses komunikasi tidak lagi berada dalam tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup yang berskala kecil dan terbatas, tetapi telah membawa manusia untuk berorientasi kearah skala yang lebih luas dan lebih kompleks.⁷⁹

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Alimuddin Budung selaku anggota legislatif dalam memperkuat pola komunikasi dengan masyarakat.

“Pola komunikasi yang kami bangun itu adalah tiga variatif 1. Komunikasi saya melalui pendekatan formal, 2. Pendekatan keagamaan dari masjid kemasjid dimanapun kami singgah shalat di masjid kami tetap membangun komunikasi dengan jamaah, dan yang 3. Sosialisasi politik itu yang kami

⁷⁸Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2011), h 1

⁷⁹ Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Prakteknya*, h 35

*lakukan, dan ini sedikit merupakan pendekatan yang berbasis keagamaan tetapi kami juga memperkuat komunikasi ke masyarakat umum”.*⁸⁰

Komunikasi formal dalam hal ini bersifat pribadi maupun kelompok, komunikasi pribadi ialah komunikasi yang dilakukan sebagai pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang bersifat pribadi, dengan ikatan emosional yang kuat dan saling ketergantungan yang tinggi, dalam suatu interaksi baik melalui pertemuan secara langsung (tatap muka) maupun menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (media).⁸¹ Komunikasi kelompok ialah komunikasi yang dilakukan secara bersama melalui interaksi secara tatap muka antara kelompok-kelompok, untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain.⁸²

Komunikasi melalui pendekatan keagamaan disini seperti melalui pendekatan dari masjid ke masjid artinya ketika selesai melakukan ibadah shalat selalu membangun komunikasi antar jamaah dan melalui acara-acara yang bersifat keagamaan seperti, isra' mi'raj, maulid nabi Muhammad maupun acara tausiah, dan pengajian agama yang dilakukan oleh masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada masyarakat, dan bagaimana masyarakat tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik.⁸³ Seperti betapa pentingnya mengikuti partisipasi politik dalam hal ini pemilihan umum.

⁸⁰ Alimuddin Budung (45 tahun) Anggota Legislatif Kab. Pinrang, *Wawancara*, Massewae, 27-9-2016

⁸¹ Muhammad Ansar, *Komunikasi Antar Pribadi dan Kelompok*, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h 12

⁸² Muhammad Ansar, *Komunikasi Antar Pribadi dan Kelompok*, h 120

⁸³ Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005) h 25

Keterpilihan seorang wakil rakyat tidak lupuk dari peran serta masyarakat dalam mengikuti peroses pemilihan umum oleh karna itu legislator sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat tidak akan menjabat sebagai anggota legislatif apabila tidak adanya peran serta dalam peroses partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partrisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi polotik ialah keikut sertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang memengaruhi kehidupannya.⁸⁴

Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikut sertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan

⁸⁴ Ramlan Surabakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2010), h 179

perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik.⁸⁵

Dalam hal ini peranan yang dimaksud diantaranya pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye, serta melakukan aksi demonstrasi, menulis dimedia cetak, melakukan dialog dan sebagainya. Namun kegiatan kegiatan ini, sudah barang tentu harus disertai oleh rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karna itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan umum merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat.⁸⁶ Berikut seperti yang dikatakan oleh bapak Salamat umur 50 tahun pekerjaan sebagai petani selaku masyarakat Desa Massewae tentang alasan memilih bapak Alimuddin Budung.

*“Memang wajar apabila beliau terpilih. Disamping beliau dekat dan suka berdiskusi dengan masyarakat dia juga memberikan bukti dengan kinerjanya menjabat sebagai anggota legislatif selama beberapa tahun yang lalu. Sehingga mungkin karna alasan itu masyarakat menilai bahwa memang pantas untuk didukung untk kedua kalinya”.*⁸⁷

Setiap wakil tentunya dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat memanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan.

⁸⁵ Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2013), h 127

⁸⁶ Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, h 127.

⁸⁷ Salamat (50 tahun) Masyarakat Desa Massewae, *Wawancara*, Massewae, 28-9-2016

Oleh karna itu pemupukan kelebihan kemampuan itu berkaitan erat dengan sumber daya yang dipunyai atau dapat dimanfaatkan, maka seringkali orang-orang yang mempunyai sumber daya dilihat sebagai wakil yang tepat. Hanya saja perlu diingat, hubungan antar sumber daya dan kemampuan tidaklah selalu bersifat langsung. Tidak jarang penguasa kelompok akan sumber daya menumbuhkan anggapan umum bahwa setiap orang didalam kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang diharapkan. Dalam hal ini status seseorang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk menetapkan wakilnya. Jadi masyarakat melihat bahwa wakil mereka adalah orang yang berada pada status yang cukup meyakinkan. Lazimnya, status yang dimaksud ialah elit.⁸⁸

Seseorang yang memenuhi persyaratan pokok tersebut kemungkinan besar diakui sebagai wakil didalam kehidupan masyarakat, dengan pengertian bahwa perbuatannya ataupun sikapnya disyukuri oleh pihak yang diwakili. Pada dasarnya penerimaan atau pengakuan yang otomatis terhadap wakil, berkembang didalam masyarakat yang menumbuhkan kepemimpinan tradisonal maupun karismatis. Pemimpin yang muncul melalui pewarisan kekuasaan ataupun pemimpin terpilih yang berhasil melampaui batas waktu kepemimpinan karena karena karisma yang dimilikinya, dapat memperoleh pengakuan sebagai wakil masyarakat. Disamping prosedur menjadi wakil seperti itu, terutama dimasa modern ini, biasanya wakil ditunjuk oleh pihak yang diwakili memilihnya di antara orang-orang yang dianggap

⁸⁸ Toni Andirus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h 104-105

mempunyai potensi untuk menjadi wakilnya. Perlu diingat bahwa pemilihan itu sendiri dapat menjadi formalitas semata, terutama dalam hal masyarakat mengembangkan manipulasi terhadap sistem dalam rangka membentuk gambaran diri yang melebihi kodrat.⁸⁹ Seperti yang dikutip pada wawancara dengan ibu Hj Habibah umur 59 tahun pekerjaan ibu rumah tangga tentang alasan beliau memilih bapak Alimuddin Budung sebagai legislator.

*“Alasan saya memilih bapak Alimuddin Budung sebagai legislatif ialah di samping saya cocok dengan beliau saya juga melihat latar belakang pendidikannya, karakternya, dia juga aktif dibidang-bidang keagamaan dan kinirjanya sebagai anggota legis latif karna beliau ini sudah 2 peride”.*⁹⁰

Menurut pendapat ibu Hj Habibah diatas dalam pemilihan calon legislatif kita tidak boleh langsung memilih begitu saja, kita harus melihat latar belakang pendidikannya bagaimana karekternya dan yang lebih penting apakah dia memang cocok untuk terpilih jadi anggota legislatif.

Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti halnya kekuasaan seorang pemimpin bersumber dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain karena sifat dan sikapnya, luas pengetahuan dan pengalamannya, pandai berkomunikasi dalam hubungan-hubungan interpersonal. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan khusus sehingga mempunyai kekuasaan, kewibawaan dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya untuk mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya untuk menilai sukses

⁸⁹ Toni Andirus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h 104-105

⁹⁰ Habibah (59 tahun) Tokoh Masyarakat Desa Massewae, *Wawancara*, Massewae, 29-9-2016

atau tidaknya seorang pemimpin dapat dilakukan dengan mengamati sifat-sifat dan kualitas/mutu perilakunya, yang digunakan sebagai kriteria menilai kepemimpinannya. Seperti halnya diungkapkan oleh Asri umur 24 tahun pekerjaan staf puskesmas selaku tokoh pemuda Desa Massewae dalam memilih sebuah wakil rakyat.

“Dalam memilih sebuah pemimpin kita tidak boleh langsung memilih begitu saja tanpa ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dalam hal ini mulai dari latar belakang pendidikannya, caranya berkomunikasi dengan masyarakat, sifat dan perilakunya, apakah dia mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan, dan yang lebih penting apakah dia mempunyai cukup suara supaya bisa terpilih”.⁹¹

Kekuasaan merupakan salah satu faktor yang menentukan pilihan seseorang, kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Karena kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain, maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Cara pengendalian unit organisasi dan individu didalamnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih.⁹²

⁹¹ Asri (24 tahun) Tokoh Pemuda Desa Massewae, Wawancara, Massewae, 28-9-2016

⁹² Elly M Satiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), h

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadirnya Alimuddin Budung sebagai anggota legislatif merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk mewakilinya di bidang pemerintahan. Masyarakat tentu banyak menaruh harapan pada legislator yang telah dipilihnya untuk mewakili kepentingan- kepentingan yang ada pada masyarakat. Peran Alimuddin Budung sebagai legislator dalam pembangunan infrastruktur ini sudah sesuai dengan fungsinya didalam komisi tiga yaitu masalah pekerjaan umum. Sebagai legislator secara optimal sudah menjadi fasilitator dalam pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan maupun jembatan pertanian.
2. Relasi yang dibangun dengan masyarakat mengutamakan silaturrahim yang dibangun dengan baik dan menjalin hubungan kekerabatan, walaupun hal ini belum secara maksimal dijalankan karena ada sebagian masyarakat yang merasa kecewa sebab masih ada perbedaan sikap antara yang mendukung dengan yang tidak mendukungnya pada saat proses pemilu. Kemudian pola komunikasi yang dijalankan ada 3 yaitu pertama komunikasi formal, kemudian komunikasi berbasis keagamaan, dan terakhir bersosialisasi masalah politik.

B. Saran/Impilikasi

Diharapkan kedepannya legislator lebih meningkatkan perannya dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat terutama didaerah konstituennya, sering berkunjung, berintraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat tanpa ada perbedaan antara yang mendukung maupun tidak mendukung. Karena DPRD sebagai pilar utama demokrasi yang seharusnya menjadi aktor utama dalam mendorong inisiasi untuk perbaikan lebih baik. Bagaimanapun juga, lembaga tempat mereka diberikan amanah oleh rakyat ini adalah salah satunya lembaga perwakilan yang diberikan oleh Negara untuk menjamin hak-hak masyarakat agar dapat diakomodir aspirasinya.

Daftar Pustaka

- Al-quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang, Toha Putra 2015
- Ansar, Muhammad, *Komunikasi Antar Pribadi dan Kelompok*, Makassar: Alauddin University Press, 2015
- B Miles, Matthew, Michael Huberman. “*Analisis data kualitatif*” Jakarta. UI Press 1992
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama 2008
- Handayani, Risma, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar, Alauddin University Press 2014
- Hikmat, M Mali, *Komunikasi Politik Teori dan Prakteknya*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media 2011
- Hasnawati, Noor, *Strategi Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dapil 1 Kec. Somba Opu Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihnya*, sebuah skripsi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin 2011
- Hasnawiyah, “Interaksi Sosial Antara Pemimpin Dengan Karyawan Pada Toko Buku Gramedia di Samarina”, *Jurnal Sosiologi* Volume 4 No 1 2016
- Johan, Silomi Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Long Wawang Kabupaten Malinau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* volume 3 no 2 2015
- Katalog Badan pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Pinrang : BPS, 2014
- Liput, Nopel, Peran Kepala Desa Dalam Menggalang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan fisik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 3 no 2 2015
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2011
- Masri, Rasyid, Abd, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, Makassar, Alauddin University Press 2015
- Mufti, Muslim, *Teori Teori Politik* Bandung: pustaka setia 2012

- Muliyadi, Deddy, *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*, Bandung, Ramaja Rosda Karya, 2013
- Pito, Andrianus Toni, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung Penerbit Nuansa, 2006
- Rahman, A, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2007
- Rush, Michael, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005
- Sahrani, Elva, Peran Anggota Legislatif Dalam Pengawasan APBD, jurnal *Citizenship* volume 1 No 1 2013.
- Satiadi, M Elly, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta Kencana Perana Media Groub 2013
- Setiawan, Budi Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD, jurnal *Sosiohumaniora* volume 15 No 2 2013.
- Sianturi, Harapan, Josmagel, *Hubungan Antara Anggota Legislatif Dengan Konstituen di Daerah Pemilihnya*, sebuah skripsi fakultas ilmu sosial dan politik universitas Sumatra Utara medan 2014.
- Stoker, Gerry, dan Marsh, David, *Teori dan Metode dalam ilmu politik* Bandung: Nusa Media, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persaja, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: alfabeta, 2014
- Sumardansyah, Agus, Peran Anggota Legislatif Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* volume 1/No.01/2013
- Surabakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2010
- Syamsuddin, Herman, *Masih Ada Keberpihakan*, Makassar : Komite Pemantau Legislatif 2011
- Wahidin, Samsul, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010

Daftar Gambar



Gambar I wawancara dengan bapak Alimuddin Budung



Gambar II wawancara dengan Asri tokoh pemuda Desa Massewae



Gambar III wawancara dengan bapak Lahaling masyarakat Desa Massewae



Gambar IV wawancara dengan bapak Syamsuddin sekertaris Desa Massewae

RIWAYAT HIDUP



WAHYUDDIN, lahir tanggal 14 APRIL 1994, Kaliang Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak H. Bunyamin dan Ibu Hj. Murniati Djalahu.

Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari sekolah dasar SDN 32 Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulsel (2000-2006) dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan Kecamatan Dampanua Kabupaten Pinrang Sul-sel (2006-2009). Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Sulsel (2009-2012).

Tahun yang sama 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik dan mengambil jurusan Ilmu Politik (2012-2016). Selama masa perkuliahan penulis juga aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu himpunan mahasiswa jurusan (HMJ), badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan resimen mahasiswa (Menwa) kemudian organisasi ekstra yaitu pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII), ikatan pelajar nahdlatul ulama (IPNU), dan kesatuan mahasiswa Pinrang (KMP).